



# **INTEGRITAS**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
2013**

**PUSDIKMIN LEMDIKLAT**

**<http://www.pusdikmin.com>**

## RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT

- 1) **Nama Diklat** : **Diklat Kepemimpinan TK.IV**
- 2) **Mata Diklat** : **Integritas**
- 3) **Alokasi Waktu** : **18 Jp**
- 4) **Deskripsi Singkat** : Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan integritas  
integritas  
  
dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran akuntabilitas, etika, dan aktualisasi akuntabilitas dan etika. Mata Diklat disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansinya.
- 5) **Tujuan Pembelajaran**
  - a. Hasil Belajar mengaktualisasikan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu integritas pribadinya dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi
  - b. Indikator Hasil Belajar : Peserta diharapkan mampu
    - 1) Menginternalisasi akuntabilitas;
    - 2) Menginternalisasi etika;
    - 3) Mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi.

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK		METODE	ALAT BANTU DAN MEDIA	ESTIMASI WAKTU				REFERENSI/KET
		MATERI POKOK	SUB MATERI			T	L	La p	Total	
	1) Menginternalisasi akuntabilitas	Akuntabilitas	1) Penjelasan mengenai pentingnya integritas bagi aparatur pemerintah 2) Penjelasan mengenai pentingnya pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyajian</li> <li>• Pemutaran Film Pendek</li> <li>• Tanya Jawab</li> </ul>	Bahan Bacaan  Bahan Tayang  Film Pendek	3 jp			3 jp	..... ... Bahan Tayang  Film Pendek
	2) Menginternalisasi etika;	Etika	3) Menjelaskan pentingnya etika dalam mewujudkan integritas 4) Mendiskusikan penerapan dan penguatan etika di instansi peserta	Ceramah  Diskusi Kasus	•	3p	3jp		6 jp	Kasus: Akutabilitas, etika atau integritas.
	3) Mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi.	Aktualisasi Etika dan Integritas dalam pelaksanaan kegiatan instansi	5) Merumuskan aktualisasi etika dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan instansi	Kerja, Diskusi dan Presentasi Kelompok	In focus Flipchart Alat tulis Laptop dll	3 jp	6jp		9 jp	
JUMLAH						12 jp	-	6 jp	18 jp	

## RENCANA PEMBELAJARAN

- 1) Nama Diklat : Diklat Kepemimpinan TK.IV
- 2) Mata Diklat : Integritas
- 3) Alokasi Waktu : 18 Jp

4) **Deskripsi Singkat** :  
Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan integritas dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran akuntabilitas, etika, dan aktualisasi akuntabilitas dan etika. Mata Diklat disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansinya.

### 5) Tujuan Pembelajaran

- c. Hasil Belajar mengaktualisasikan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu integritas pribadinya dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi
- d. Indikator Hasil Belajar : Peserta diharapkan mampu
  - 1) Menginternalisasi akuntabilitas;
  - 2) Menginternalisasi etika;
  - 3) Mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi.

### 6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- a. Materi Pokok
  - 1) Internalisasi Akuntabilitas
  - 2) Internalisasi Etika
  - 3) Aktualisasi etika dan ingertis dalam pelaksanaan kegiatan diinstansinya.
- b. Sub Materi Pokok
  - 1) Penjelasan mengenai pentingnya integritas bagi aparatur pemerintah
  - 2) Penjelasan mengenai pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan integritas

- 3) Menjelaskan pentingnya etika dalam mewujudkan integritas
- 4) Mendiskusikan penerapan dan penguatan etika di instansi peserta
- 5) Merumuskan aktualisasi etika dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan instansi

7) KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR :

NO.	TAHAP KEGIATAN	MATERI POKOK		METODE	MEDIA DAN ALAT BANTU	ALOKASI WAKTU
		FASILITATOR	PESERTA			
1.	Pendahuluan	1) Menjelaskan deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran.	Mendengarkan penjelasan	Ceramah	Infocus flipchart	1Jp
		2) Penjelasan mengenai pentingnya integritas bagi aparatur pemerintah	- Menonton film pendek - Berdiskusi	Nonton film Tanya jawab	Infocus Film Pendek Flip chart Alat tulis	2 Jp
2.	Penyajian	3) Memfasilitasi diskusi mengenai pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan integritas	mendiskusikan Kasus	Diskusi	Flip chart Infocus dll	3 jp
		4) Memfasilitasi diskusi mengenai penerapan dan penguatan etika di instansi peserta	Mendiskusikan penerapan dan penguatan etika	Diskusi	Flip chart Infocus dll	6 jp
		5) Memandu peserta untuk merumuskan aktualisasi etika dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan instansi, dilakukan per kelompok	Mendiskusikan, merumuskan dan menpresentasikan gagasan tentang aktualisasi etika dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan di	Diskusi Presentasi	Infocus Flip chart Alat Tulis dll	5 jp

			isntansinya			
3.	Penutup		Menyampaikan komitmen terkait dengan aktualisasi integritas	<b>Pembacaan Komitmen Peserta</b> Pemaparan		1 jp

## 9. EVALUASI PEMBELAJARAN

NO.	MATERI & SUB MATERI POKOK	BENTUK EVALUASI
1.	Akuntabilitas	Evaluasi dilakukan secara kualitatif, dengan cara peserta menulis laporan diksusi kasus, merumuskan aktualisasi dan membangun komitmen.
2.	Etika	
3.	Aktualisasi Etika dan Integritas dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya	

Catatan: dimungkinkan sebagai pengganti kasus diganti dengan role play.

## 10. REFERENSI

### a) Bahan Bacaan

- Bahan-bahan terlampir.

-

### b) Bahan Tayangan

- Slide

### c) Film Pendek

### d)

Jakarta, .....

Disetujui Oleh Tim Validasi

(.....)

(.....)

(.....)

# Pengertian Etika

Etika mempunyai dua makna yaitu:

1. Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* (tunggal) atau *ta etha* (jamak) yang berarti watak, kebiasaan dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.

## *Lanjutan .....*

- **Pengertian etika yang pertama, indentik dengan pengertian moralitas.**
- **Moralitas berasal dari bahasa latin, mos (tunggal) atau mores (jamak) yang berarti adat istiadat atau kebiasaan.**
- **Jadi etika dan moralitas mempunyai arti yang sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konstan dan terulang dalam kurun waktu sehingga menjadi sebuah kebiasaan.**

*Lanjutan .....*

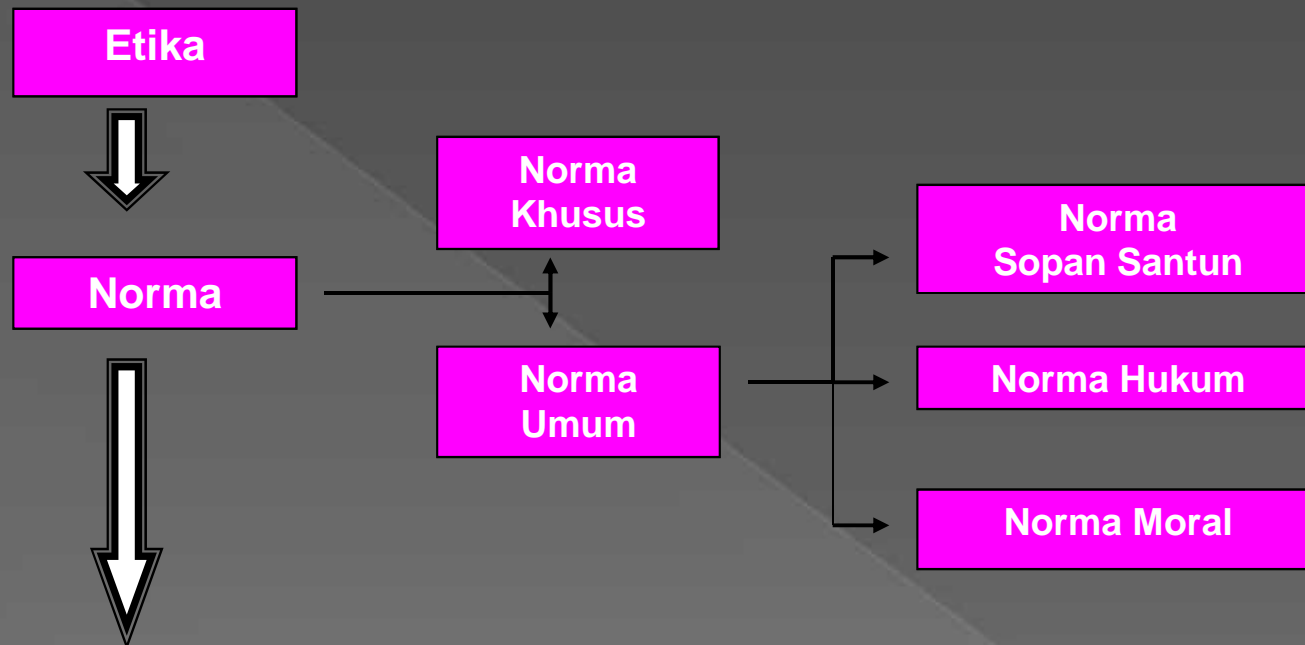
2. Pengertian etika yang kedua berbeda dengan moralitas. Etika dalam pengertian kedua ini dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian etika kedua, berbeda dengan yang pertama karena tidak berisikan nilai dan norma-norma kongkret yang menjadi pedoman hidup manusia.

# Pengertian Moralitas

- ❖ **Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral.**
- ❖ **Standar moral ialah standar yang berkaitan dengan persoalan yang dianggap mempunyai konsekuensi serius, didasarkan pada penalaran yang baik bukan otoritas kekuasaan, melebihi kepentingan sendiri, tidak memihak dan pelanggarannya diasosiasikan dengan perasaan bersalah, malu, menyesal, dll.**

# Tujuan Etika dan Norma



1. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera.
2. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom

# Macam-macam Norma

- ◉ Norma diartikan sebagai kaidah atau pedoman untuk melakukan sesuatu.
- ◉ Secara umum, norma dibagi menjadi 2 yaitu norma khusus dan norma umum
  1. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan tertentu atau khusus, ex: aturan olahraga, aturan kuliah, dll
  2. Norma umum adalah aturan yang bersifat umum dan universal. Norma umum dibagi menjadi 3 yaitu norma sopan santun, norma hukum dan norma moral.

*Lanjutan pengertian norma .....*

- **Norma sopan santun atau norma etiket adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Misal: mengatur perilaku pergaulan, bertamu, minum, makan, berpakaian, dll.**
- **Norma hukum merupakan norma biasanya dikodifikasikan dalam bentuk aturan tertulis sebagai pegangan bagi masyarakat untuk berperilaku yang baik maupun sebagai pedoman untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggarnya. Misal: UUD 1945, PP, Ttap MPR, Keppres, KUHP, dll**

*Lanjutan pengertian norma .....*

- **Norma moral adalah norma yang bersumber dari hati nurani (*conscience*), menjadi tolak ukur yang dipakai oleh masyarakat dalam menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai anggota masyarakat atau sebagai orang dengan jabatan atau profesi tertentu.**

## **Perbedaan Norma Moral dan Norma Hukum**

- 1. Norma moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai konsekuensi serius bagi kesajahteraan, kebaikan dan kehidupan manusia.**
- 2. Norma moral tidak ditetapkan dan diubah oleh keputusan penguasa tertentu.**
- 3. Norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan moral (moral sense) tertentu, seperti malu, menyesal, bersalah, dll.**

# Perkembangan Sikap Moral

**Anomi**



**Heteronomi**



**Sosionomi**



**Otonomi**

- ❖ **Anomi**, terjadi pada masa anak – anak yang belum mengenal moral dan tidak peduli pada yang lain.
- ❖ **Heteronomi**, merupakan sikap moral individu yang tergantung pada figur otoriter seperti orang tua atau guru
- ❖ **Sosionomi**, merupakan sikap moral individu yang bergantung pada kelompok referensinya.
- ❖ **Otonomi**, merupakan sikap moral yang tertinggi dimana individu mengambil keputusan moral sendiri dan tidak tergantung pada orang lain

# Teori – Teori Etika

1. **Etika Deontologi**, berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut teori ini tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri.

**Contoh:** manusia beribadah kepada Tuhan karena sudah merupakan kewajiban manusia untuk menyembah Tuhannya, bukan karena perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala.

## *Lanjutan Teori-teori Etika .....*

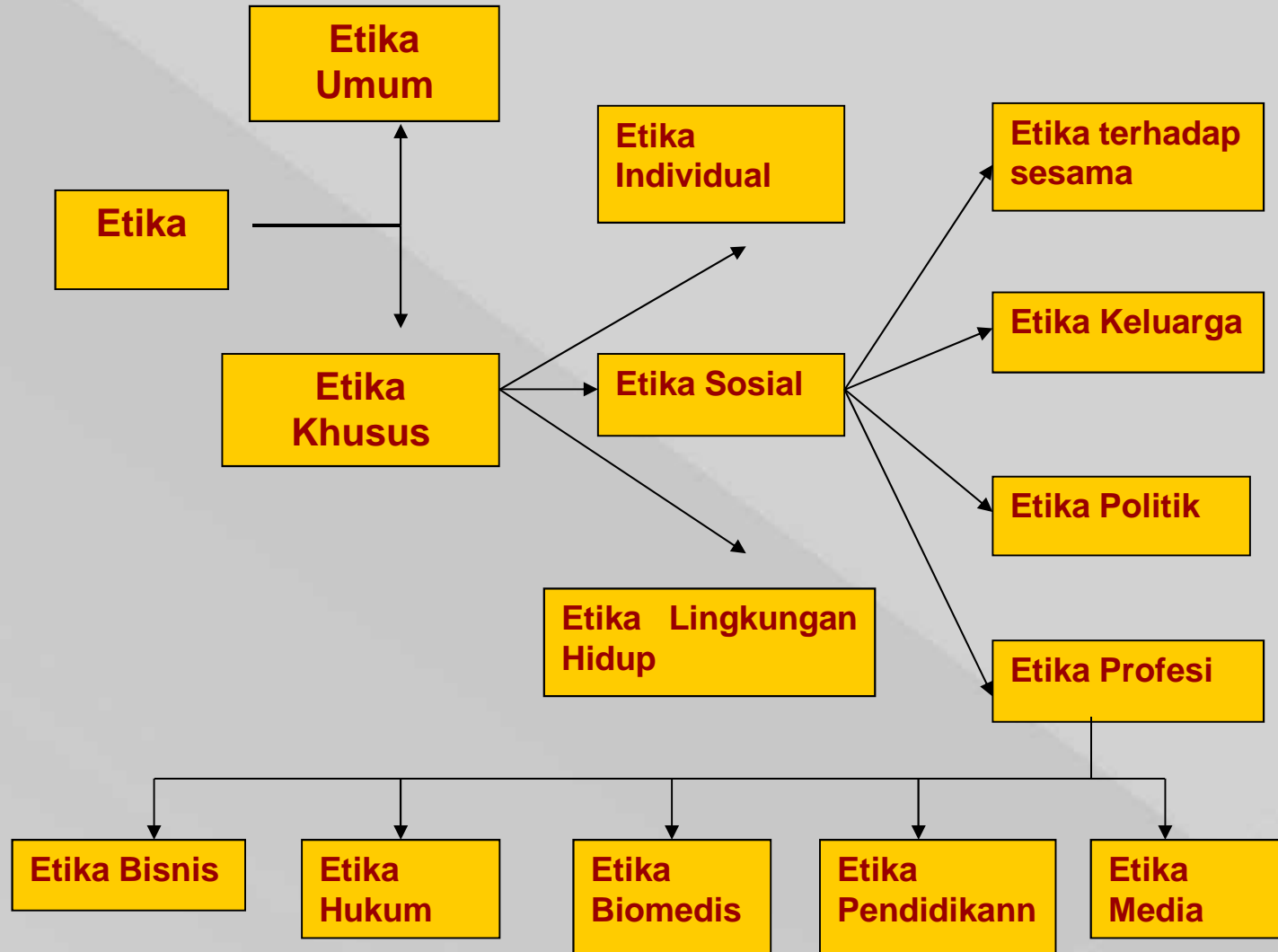
2. **Etika Teleologi**, berasal dari kata Yunani *telos* yang berarti tujuan, sasaran, akibat dan hasil. Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berguna.
  - ❖ Dari sudut pandang “apa tujuannya”, etika teleologi dibedakan menjadi dua yaitu:
    - a. Teleologi Hedonisme (hedone= kenikmatan) yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan.
    - b. Teleologi Eudamonisme (eudamonia=kebahagiaan) yaitu tindakan yang bertujuan mencari kebahagiaan hakiki.

*Lanjutan Teori-teori Etika .....*

❖ Dari sudut pandang “untuk siapa tujuannya”, etika teleologi dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Egoisme Etis, yaitu tindakan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri.
- b. Utilitarianisme, yaitu tindakan yang berguna dan membawa manfaat bagi semua pihak.

# Klasifikasi Etika




# Daftar Pustaka

1. **Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius**
2. **Muslich. 1998. Etika Bisnis, Pendekatan Substantif dan Fungsional. Yogyakarta: Ekonisia**
3. **Velasquez, M.G. 2002. Business Ethics: Concepts and Cases (5<sup>th</sup> ed). Upper Saddle River NY: Prentice-Hall**




# Etika Administrasi Publik

Ali Rokhman

- 
- Definisi etika
  - Definisi etika administrasi publik

# Beberapa Definisi

- 
- **Etika**, dari bahasa Yunani *ethos*, artinya: kebiasaan atau watak
  - **Moral**, dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*), artinya: cara hidup atau kebiasaan.
  - **Norma**, dalam bahasa Latin, *norma* berarti penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris, *norm*, berarti aturan atau kaidah.
  - **Nilai**, dalam bhs Inggris *value*, berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal)

# Definisi Etika Administrasi Publik



- Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession (Chandler & Plano, *The Public Administration Dictionary*, 1982)
- Aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen
- Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat

# Posisi Etika dalam Studi Administrasi Publik




- Teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan-pilihan moral (etika).
- Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien.
- Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga harus dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggungjawab.

# Old and New Public Administration (Denhardt)

- Dapat dipetakan posisi etika dimana
- Tabel perbedaan [here!!](#)

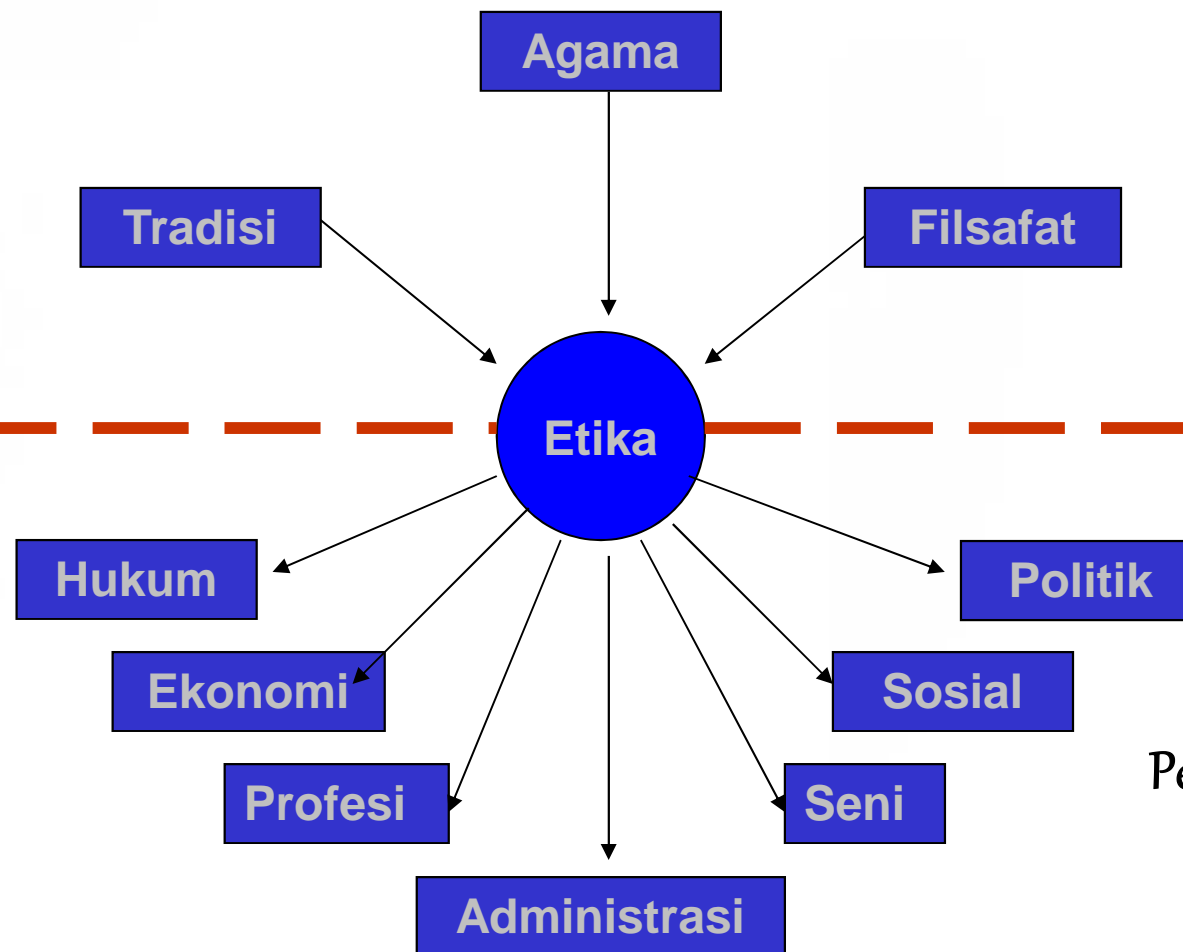


# 4 aliran pemikiran etika

- 
- **Teori Empiris:** etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan
  - **Teori Rasional:** manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika.
  - **Teori Intuitif:** Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk.
  - **Teori Wahyu:** Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa.

# Konteks Etika

*Sumber Etika*



*Penerapan Etika*

# Hukum dan Etika

- Keduanya mengatur perilaku individu
- Terdapat perbedaan: ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis
- Hukum bersifat eksternal dan dapat ditegakkan tanpa melibatkan perasaan, atau kepercayaan orang (sasaran hukum), sementara etika bersifat internal, subyektif, digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran individu.




- Hukum dalam konteks administrasi adalah soal pemberian otoritas atau instrumen kekuasaan
- Basis dari hukum adalah etika, dan ketika hukum diterapkan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip etika
- Banyak kasus, secara hukum dibenarkan tapi secara etika dipermasalahkan [trend anak politisi yang jadi calon anggota legislatif]

# Debat Herman Finer Vs. Carl Friedrich



- Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi yang bertanggungjawab yang diperlukan adalah penegakan sistem kontrol melalui undang-undang dan peraturan yang dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum.
- Friedrich (1940): Birokrasi yang bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan dengan dengan menseleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas, dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik.

# Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah

- 
- Bohong kepada publik
  - Korupsi, kolusi, nepotisme
  - Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain-lain
  - Melanggar sumpah jabatan
  - Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan kepentingan publik

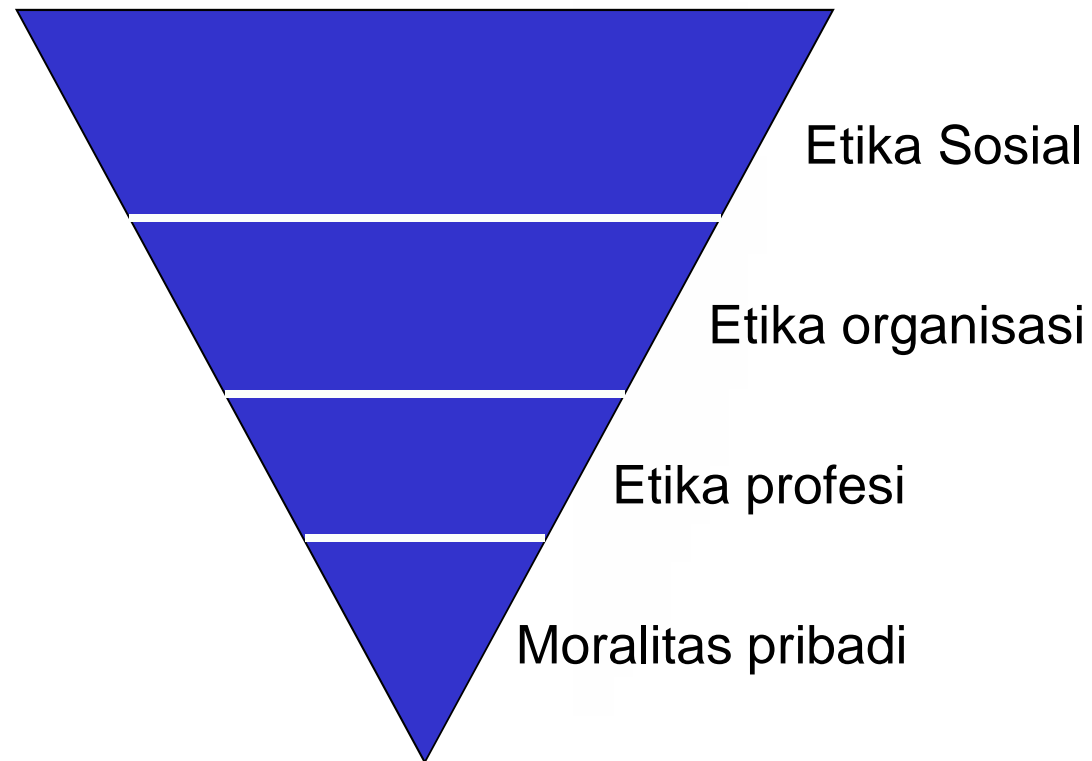
# Empat Hirarki Etika



**Makro**



**Mikro**



# Moralitas Pribadi



- Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu
- Produk dari sosialisasi nilai masa lalu
- Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu
- Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu
- Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi

# Etika profesi




- Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional
- Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme (kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi)
- Dapat dirumuskan ke dalam **kode etik** profesional yang berlaku secara universal
- Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi (pencabutan lisensi)


# Etika Organisasi

- Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi
- Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi)
- Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal
- Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat
- Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi

# Etika Sosial

- 
- Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial
  - Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial
  - Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat
  - Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain]
  - Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial [diberitakan sebagai tersangka]<sup>17</sup>

# Kenapa diperlukan peraturan etika?

- 
- Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi.
  - Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk.
  - Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi.
  - Organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanya dinilai buruk, karena itu perlu etika.

# Kenapa perilaku tidak etis terjadi?



- Kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial).
- Kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri
- Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis.